



BLT-DD Sesuai Ketentuan dan Aturan

MEMPAWAH-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun anggaran 2021 kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar, Kamis (6/1/2022) di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Pontianak. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Rahmadi.

Bupati Mempawah, Hj Erlina bersama Wakil Ketua DPRD Mempawah, Sayuti, ST berkesempatan hadir menerima LHP BPK RI.

Rahmadi menjelaskan, LHP tersebut berkenaan dengan pemeriksaan terhadap pengelolaan program perlindungan sosial yang disalurkan melalui kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun anggaran 2021.

"Termasuk pula program belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2021 yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mempawah," katanya.

Rahmadi menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dimaksudkan untuk menilai dan memastikan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD yang dilaksanakan

pemerintah daerah telah mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD, telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan dalam semua hal yang material," tuturnya.



LHP BPK: Bupati saat menerima LHP BPK di Pontianak.

FOTO ISTIMEWA

Secara keseluruhan, Rahmadi mengingatkan semua pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalbar agar bekerja optimal dalam mengelola program perlindungan sosial di masyarakat. Baik itu melalui program BLT DD maupun pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah.

"Intinya harus senantiasa berpedoman pada aturan dan ketentuan yang ada.

Dan terpenting pula, program tersebut harus tepat sasaran sebagaimana target yang dicanangkan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina berjanji bekerja maksimal merealisasikan program-program kerja pemerintah daerah maupun pusat di masyarakat Kabupaten Mempawah. Dan Erlina menjamin, realisasi penggunaan anggarannya

terap mengacu pada aturan dan ketentuan yang ada.

"Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya mempertahankan kinerja yang baik di seluruh jaja-

ran. Dan pastinya, kami berkomitmen mengikuti peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran agar tidak menyalahi aturan yang ada," pungkasnya.

Selain Pemerintah Kabupaten Mempawah, LHP BPK RI perwakilan Kalbar juga diserahkan kepada Bupati Sambas, Ketapang dan Landak. (wah)